



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 18 C /KEP/HK/2022**

TENTANG

**INDEKS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR ,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kriteria Tempat Bertugas;
 - b. bahwa dalam rangka tertib dalam penetapan besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan kriteria Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada huruf, perlu ditetapkan Indeks Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas di daerah yang memiliki kesulitan berkaitan dengan akses dan fasilitas penunjang serta merupakan daerah terpencil.;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Indeks Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Tempat Bertugas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 037).

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Indeks Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Tempat Bertugas.
- KEDUA** : Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang pelaksanaan tugasnya berlokasi di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi berkaitan dengan akses dan fasilitas penunjang serta merupakan daerah terpencil, yang meliputi:
- a. pegawai ASN pada cabang dinas yang berada di kabupaten; dan
 - b. pegawai ASN pada Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di kabupaten,
- yang memenuhi Indeks Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Tempat Bertugas.
- KETIGA** : Indeks Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. †

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 Januari 2022

† GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR †


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN.**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 18C /KEP/HK/2022****TANGGAL : 17 Januari 2002****TENTANG INDEKS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS**

NO.	LOKASI KANTOR					IKG TEMPAT KANTOR BERADA	IKG TERENDAH DI WILAYAH PROVINSI	INDEKS TPP TEMPAT BERTUGAS
	KABUPATEN	SKPD	KANTOR	KECAMATAN	DESA			
1	Sumba Barat	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sub Lab Hayati Lamboya	Lamboya	Kabu Karudi	34,96	13,88	2,52
	Sumba Barat	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Lamboya	Kabu Karudi	34,96	13,88	2,52
	Sumba Barat	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Tana Righu	Loko Ry	51,63	13,88	3,72
2	Sumba Timur	Dinas Peternakan	Instalasi Kabar	Rindi	Kabar	57,29	13,88	4,13
	Sumba Timur	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Lewa	Kondamara	35,92	13,88	2,59
	Sumba Timur	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Tabundung	Bangga Watu	42,45	13,88	3,06
	Sumba Timur	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Kahaungu Eti	Kamanggih	31,41	13,88	2,26
	Sumba Timur	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Pahunga Lodu	Kaliuda	32,25	13,88	2,32
	Sumba Timur	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Umalulu	Umalulu	37,99	13,88	2,74

NO.	LOKASI KANTOR					IKG TEMPAT KANTOR BERADA	IKG TERENDAH DI WILAYAH PROVINSI	INDEKS TPP TEMPAT BERTUGAS
	KABUPATEN	SKPD	KANTOR	KECAMATAN	DESA			
	Sumba Timur	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Kota Waingapu	Mbatakapidu	36,41	13,88	2,62
3	Kupang	Dinas Peternakan	Instalasi Sumlili	Kupang Barat	Sumlili	33,47	13,88	2,41
	Kupang	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Balai Benih Induk Padi (BBI) Noelbaki	Kupang Tengah	Noelbaki	24,75	13,88	1,78
	Kupang	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Balai Benih Induk Palawija (BBI) Tarus	Kupang Tengah	Mata Air	33,54	13,88	2,42
	Kupang	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sub Lab Hayati Baumata	Taebenu	Baumata	26,44	13,88	1,90
	Kupang	Dinas Peternakan	Instalasi Sumlili	Fatuleu	Kuimasi	31,66	13,88	2,28
	Kupang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Nekamese	Oben	25,02	13,88	1,80
	Kupang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Amarasi	Kotabes	31,24	13,88	2,25
	Kupang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Sulamu	Pantai Beringin	37,00	13,88	2,67
4	Timor Tengah Selatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Balai Benih Hortikultura (BBH) Oelbubuk	Mollo Tengah	Oelbubuk	32,93	13,88	2,37
	Timor Tengah Selatan	Dinas Peternakan	Instalasi Besipae	Amanuban Selatan	Mio	39,94	13,88	2,88
	Timor Tengah Selatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Mollo Utara	Tunua	47,77	13,88	3,44
	Timor Tengah Selatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Polen	Puna	28,53	13,88	2,06
	Timor Tengah Selatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Amanuban Barat	Nulle	34,93	13,88	2,52

NO.	LOKASI KANTOR					IKG TEMPAT KANTOR BERADA	IKG TERENDAH DI WILAYAH PROVINSI	INDEKS TPP TEMPAT BERTUGAS
	KABUPATEN	SKPD	KANTOR	KECAMATAN	DESA			
	Timor Tengah Selatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Batu Putih	Oebobo	29,53	13,88	2,13
	Timor Tengah Selatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Amanuban Timur	Oeekam	61,72	13,88	4,45
	Timor Tengah Selatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Boking	Fatu Manufui	58,01	13,88	4,18
5	Timor Tengah Utara	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Balai Benih Hortikultura (BBH) Oelnitep	Insana Barat	Subun	43,71	13,88	3,15
	Timor Tengah Utara	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Miomaffo Barat	Saenam	51,26	13,88	3,69
	Timor Tengah Utara	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Miomaffo Timur	Oesena	31,70	13,88	2,28
	Timor Tengah Utara	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Noemuti	Bijeli	41,34	13,88	2,98
	Timor Tengah Utara	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Insana	Fatoin	45,07	13,88	3,25
	Timor Tengah Utara	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Insana Utara	Humusu Wini	33,93	13,88	2,44
6	Alor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Kebun Dinas Otvai	Alor Barat Laut	Otvai	36,28	13,88	2,61
	Alor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Kebun Dinas Mainang	Alor Tengah Utara	Welai Selatan	32,51	13,88	2,34
	Alor	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Pantar Tengah	Aramaba	38,81	13,88	2,80

NO.	LOKASI KANTOR					IKG TEMPAT KANTOR BERADA	IKG TERENDAH DI WILAYAH PROVINSI	INDEKS TPP TEMPAT BERTUGAS
	KABUPATEN	SKPD	KANTOR	KECAMATAN	DESA			
	Alor	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Alor Timur	Maritaing	28,37	13,88	2,04
7	Lembata	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Nagawutung	Duawutun	25,64	13,88	1,85
	Lembata	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Nagawutung	Labalimut	55,63	13,88	4,01
	Lembata	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Atadei	Katakeja	34,92	13,88	2,52
	Lembata	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Ile Ape	Laranwuntun	28,50	13,88	2,05
	Lembata	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Lebatukan	Hadakewa	24,61	13,88	1,77
	Lembata	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Buyasari	Benihading	31,91	13,88	2,30
	Lembata	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Buyasari	Benihading	31,91	13,88	2,30
8	Sikka	Dinas Sosial	UPT Lansia Paduwau	Kangae	Watumilok	24,33	13,88	1,75
	Sikka	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Balai Benih Utama Magepanda (BBU) Magepanda	Magepanda	Magepanda	33,14	13,88	2,39
	Sikka	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Bola	Wolokoli	33,66	13,88	2,42
	Sikka	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Waigete	Egon	27,36	13,88	1,97
9	Ende	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sub Lab Hayati Ende dan Ndona	Ndona	Nanganesa	25,62	13,88	1,85
	Ende	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Kebun Dinas Detubapa	Detusoko	Wolofeo	39,38	13,88	2,84

NO.	LOKASI KANTOR					IKG TEMPAT KANTOR BERADA	IKG TERENDAH DI WILAYAH PROVINSI	INDEKS TPP TEMPAT BERTUGAS
	KABUPATEN	SKPD	KANTOR	KECAMATAN	DESA			
	Ende	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Balai Benih Hortikultura (BBH) Detubapa	Detusoko	Wolofeo	39,38	13,88	2,84
10	Ngada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sub Lab Hayati Waebela	Inerie	Waebela	32,38	13,88	2,33
11	Rote Ndao	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	UPT Pendapatan dan Aset Daerah	Lobalain	Baadale	42,12	13,88	3,03
	Rote Ndao	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Balai Benih Utama Padi/Palawija Buisan (BBU) Buisan Lobalain	Lobalain	Baadale	42,12	13,88	3,03
12	Manggarai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Satar Mese Barat	Satar Lenda	44,05	13,88	3,17
	Manggarai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Ruteng	Goloworok	43,00	13,88	3,10
	Manggarai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Cibal	Wudi	31,15	13,88	2,24
	Manggarai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Reok Barat	Wae Kajong	38,42	13,88	2,77
13	Manggarai Barat	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Kebun Dinas Roe	Mbeliling	Cunca Lolos	41,50	13,88	2,99
	Manggarai Barat	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Balai Benih Utama Lembor (BBU) Lembor	Lembor	Siru	44,12	13,88	3,18
	Manggarai Barat	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Kebun Palawija Lembor	Lembor	Daleng	52,29	13,88	3,77
	Manggarai Barat	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Balai Benih Hortikultura (BBH) Lembor	Lembor	Daleng	52,29	13,88	3,77
	Manggarai Barat	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Sano Nggoang	Golo Mbu	28,60	13,88	2,06

NO.	LOKASI KANTOR					IKG TEMPAT KANTOR BERADA	IKG TERENDAH DI WILAYAH PROVINSI	INDEKS TPP TEMPAT BERTUGAS
	KABUPATEN	SKPD	KANTOR	KECAMATAN	DESA			
14	Sumba Tengah	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	UPT Pendapatan dan Aset Daerah	Katikutana	Anakalang	35,00	13,88	2,52
	Sumba Tengah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Balai Benih Utama Waimanu (BBU) Wai Manu	Katikutana Selatan	Wai Manu	44,83	13,88	3,23
	Sumba Tengah	Dinas Peternakan	Instalasi Kondamaloba	Katikutana Selatan	Dasa Elu	41,25	13,88	2,97
	Sumba Tengah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Umbu Ratu Nggay Barat	Anajiaka	32,13	13,88	2,31
	Sumba Tengah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Mamboro	Cendana	43,48	13,88	3,13
15	Sumba Barat Daya	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Kebun Dinas Waikadada	Kodi Bangedo	Mata Kapore	50,01	13,88	3,60
	Sumba Barat Daya	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Kebun Dinas Hameli	Kodi Utara	Hameli Ate	60,42	13,88	4,35
	Sumba Barat Daya	Dinas Peternakan	Instalasi Loura	Loura	Lete Konda	47,51	13,88	3,42
	Sumba Barat Daya	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	UPT Pendapatan dan Aset Daerah	Kota Tambolaka	Kadi Pada	50,97	13,88	3,67
	Sumba Barat Daya	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Wewewa Barat	Waimangura	21,69	13,88	1,56
	Sumba Barat Daya	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Wewewa Timur	Dede Pada	45,06	13,88	3,25
16	Nagekeo	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Kebun Dinas Anakoli	Wolowae	Anakoli	38,29	13,88	2,76
17	Manggarai Timur	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	UPT Pendapatan dan Aset Daerah	Borong	Rana Masak	49,30	13,88	3,55

NO.	LOKASI KANTOR					IKG TEMPAT KANTOR BERADA	IKG TERENDAH DI WILAYAH PROVINSI	INDEKS TPP TEMPAT BERTUGAS
	KABUPATEN	SKPD	KANTOR	KECAMATAN	DESA			
	Manggarai Timur	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Borong	Rana Masak	45,40	13,88	3,27
	Manggarai Timur	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Kebun Dinas Pinis	Rana Mese	Bangka Kempo	45,40	13,88	3,27
	Manggarai Timur	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Borong	Golo Lalong	53,24	13,88	3,84
	Manggarai Timur	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Rana Mese	Bangka Kempo	45,40	13,88	3,27
	Manggarai Timur	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Kota Komba	Gunung Baru	55,12	13,88	3,97
	Manggarai Timur	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Elar	Legur Lai	70,30	13,88	5,06
	Manggarai Timur	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Sambi Rampas	Wela Lada	40,38	13,88	2,91
	Manggarai Timur	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Lamba Leda	Lencur	66,73	13,88	4,81
18	Sabu Raijua	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	UPT Pendapatan dan Aset Daerah	Sabu Barat	Roboaba	58,56	13,88	4,22
	Sabu Raijua	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Sabu Barat	Menia	34,61	13,88	2,49
	Sabu Raijua	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Sabu Barat	Menia	34,61	13,88	2,49
19	Malaka	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Malaka Tengah	Kamanasa	25,34	13,88	1,83

NO.	LOKASI KANTOR					IKG TEMPAT KANTOR BERADA	IKG TERENDAH DI WILAYAH PROVINSI	INDEKS TPP TEMPAT BERTUGAS
	KABUPATEN	SKPD	KANTOR	KECAMATAN	DESA			
	Malaka	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Sasita Mean	As Manulea	32,23	13,88	2,32
	Malaka	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Resort Pengelolaan Hutan KPH	Kobalima	Rainawe	23,08	13,88	1,66

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VB

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT